



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LALU MAKSUM SUPARDI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PENANGANAN SAMPAH, LIMBAH, LIMBAH B3 DAN SANITASI
3. NHK : 470164

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 3.544.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/200 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 150.000.000
2. Tanah Seluas 14650 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 1.694.000.000
3. Tanah Seluas 830 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/100 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Tanah Seluas 3900 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 780.000.000
6. Tanah Seluas 1500 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 13.000.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 90.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 12.641.066

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----



Sub Total	Rp.	3.659.641.066
III. HUTANG	Rp.	445.198.037
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.214.443.029

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.